

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693123/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 02
Tanggal : 12 Februari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 505.339.000 (LIMA RATUS LIMA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	505.339.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 505.339.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

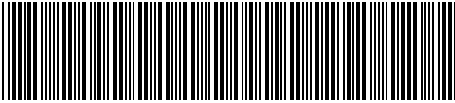
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2026

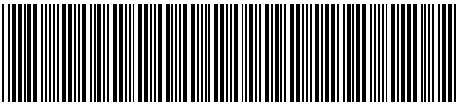


DS:3020-0660-2404-8343

Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	25.099.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	25.099.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	480.240.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	480.240.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2026
I A. INFORMASI KINERJA

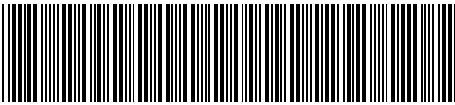


DS:3020-0660-2404-8343

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi							25.099.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah							25.099.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1,00	Rekomendasi Kebijakan			25.099.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		1,00	Rekomendasi Kebijakan			25.099.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							480.240.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah							480.240.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		4,00	Lembaga			57.265.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		4,00	Lembaga			57.265.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		300,00	Orang			24.326.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		300,00	Orang			24.326.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6,00	Lembaga			19.997.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		6,00	Lembaga			19.997.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data			9.402.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1,00	Data			9.402.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3020-0660-2404-8343

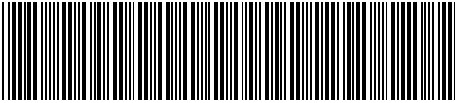
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		42,00	Orang	268.800.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	42.00	Orang	268.800.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		6,00	Kelompok Masyarakat	51.216.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	6.00	Kelompok Masyarakat	51.216.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	49.234.000
Rincian Output		:	01 QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	(PN)	1.00	Lembaga	49.234.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2026
I B. SUMBER DANA



DS:3020-0660-2404-8343

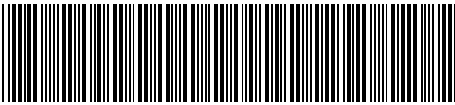
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	505.339.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	505.339.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

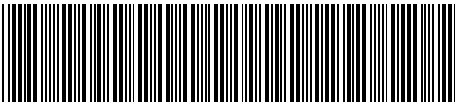


DS:3020-0660-2404-8343

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693123	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	-	505.339	-	-	-	505.339	33 . 51	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	25.099	-	-	-	25.099		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	25.099	-	-	-	25.099		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	25.099	-	-	-	25.099		
01 RM		-	25.099	-	-	-	25.099		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	480.240	-	-	-	480.240		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	480.240	-	-	-	480.240		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	57.265	-	-	-	57.265		
01 RM		-	57.265	-	-	-	57.265		
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	24.326	-	-	-	24.326		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



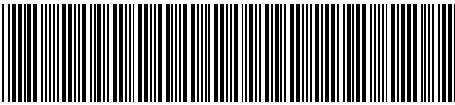
DS:3020-0660-2404-8343

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	24.326	-	-	-	24.326	065	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	19.997	-	-	-	19.997	33 . 51	
01 RM		-	19.997	-	-	-	19.997	065	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	9.402	-	-	-	9.402	33 . 51	
01 RM		-	9.402	-	-	-	9.402	065	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	268.800	-	-	-	268.800	33 . 51	
01 RM		-	268.800	-	-	-	268.800	065	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	51.216	-	-	-	51.216	33 . 00	
01 RM		-	51.216	-	-	-	51.216	065	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3020-0660-2404-8343

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

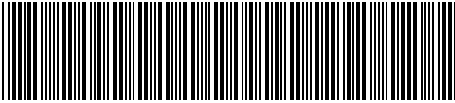
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	49.234	-	-	-	49.234	33 . 51	
	01 RM	-	49.234	-	-	-	49.234	065	
JUMLAH		-	505.339	-	-	-	505.339		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3020-0660-2404-8343

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

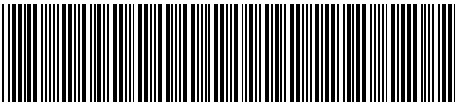
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693123	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	49.234	58.243	50.933	86.537	55.584	22.400	53.336	22.400	53.336	22.400	30.936	505.339
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	0	49.234	58.243	50.933	86.537	55.584	22.400	53.336	22.400	53.336	22.400	30.936	505.339
		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	11.193	0	0	13.906	0	0	0	0	0	0	25.099
	135.11.BF.7136	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	11.193	0	0	13.906	0	0	0	0	0	0	25.099
		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	49.234	47.050	50.933	86.537	41.678	22.400	53.336	22.400	53.336	22.400	30.936	480.240
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	49.234	47.050	50.933	86.537	41.678	22.400	53.336	22.400	53.336	22.400	30.936	480.240

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2026
IV A. B L O K I R



DS:3020-0660-2404-8343

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693123] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

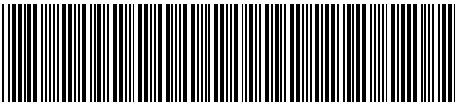
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2026
IV B. C A T A T A N



DS:3020-0660-2404-8343

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693123] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001